

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini menjadi salah satu usaha yang menjadi kegiatan ekonomi bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Keberadaan usaha tersebut di Indonesia sangat berpengaruh serta berkontribusi cukup besar dalam mendorong perekonomian Indonesia. Disamping itu, UMKM dianggap sebagai salah satu komponen dalam memperkuat perekonomian nasional karena UMKM memiliki karakteristik yang kuat, dinamis, dan efisien. Dengan adanya UMKM, dapat menciptakan lapangan kerja, menyerap jumlah pengangguran dan memberikan kontribusi tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022)

Menurut Darmasari & Wahyuni (2020) UMKM harus mampu memupuk ekonomi yang baik dan memungkinkan daerah dalam memberikan lapangan pekerjaan dan memiliki pilihan untuk membuat sektor bisnis moneter baru. Saat ini para pengusaha, khususnya UMKM harus memiliki prosedur yang solid agar barang atau jasa yang dijual dapat diminati dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Hal ini membutuhkan penguatan UMKM, sehingga UMKM di Indonesia dapat menciptakan barang-barang yang lebih baik yang mampu dibandingkan dengan organisasi mekanik besar yang menyaingi.

Saat ini pelaku ekonomi khususnya pelaku UMKM harus mempunyai

strategi yang kuat agar produk atau jasa yang dijual bisa diminati dan dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini perlu adanya pemberdayaan UMKM, sehingga UMKM yang berada di Indonesia mampu menghasilkan produk-produk unggulan yang mampu bersaing dengan perusahaan industri yang sudah besar. Baik yang berada di Indonesia atau luar negeri seperti meningkatkan inovasi produk, jasa, kualitas dan pelayanan dengan memanfaatkan bahan yang mudah didapat dengan biaya yang relatif rendah, pengembangan sumber daya manusia dengan cara melakukan pelatihan bagi pelaku UMKM agar mampu meningkatkan kreativitas, mempelajari teknologi dan melakukan penjualan secara manual atau melalui media online (Janrosl, 2018).

Andayani et al. (2021) menyatakan bahwa banyak UMKM saat ini yang hanya menggunakan modal pribadi dalam menjalankan usaha mereka meskipun pemerintah telah memberikan berbagai program permodalan yang dapat diperoleh melalui Bank guna membantu UMKM dalam memenuhi kebutuhan modalnya. Namun saat ini masih banyak pelaku UMKM yang hanya mengandalkan dana dari modal pribadi dalam mengembangkan usahanya tanpa menggunakan program yang telah disediakan oleh pemerintah tersebut. UMKM beralasan bahwa skala usaha yang tengah dijalankan masih tergolong dalam usaha kecil dan juga umur usaha masih tergolong usaha baru dalam kisaran 1-3 tahun. UMKM juga beralasan bahwa mereka mengalami kesulitan mendapatkan akses pinjaman modal dari pihak ketiga, kesulitan mendapatkan akses modal ini disebabkan karena para pelaku UMKM tidak melakukan pembukuan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan sesuai SAK yang berlaku merupakan salah satu syarat yang

diharuskan oleh pihak kreditur (perbankan) dalam memberikan kredit kepada para pelaku UMKM. Namun kenyataannya masih banyak UMKM yang tidak menyusun laporan keuangan usahanya. Hal ini disebabkan karena UMKM terlalu memfokuskan dalam proses produksi dan juga dalam operasionalnya, sehingga pembukuan atau pencatatan tidak diperhatikan oleh UMKM.

Dalam menjalankan usahanya, para pelaku UMKM mendapatkan keuntungan yang dapat diinput ke dalam laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah hasil yang didapatkan dari pencatatan yang telah dilakukan. Pencatatan ini mulai dari mencatat transaksi yang terjadi hingga menyusun laporan keuangan secara terus menerus dan terjadi secara berulang. Penyusunan laporan keuangan sangat penting untuk dilakukan karena dapat menggambarkan kondisi keuangan UMKM yang sebenarnya dan laporan keuangan juga memberikan banyak manfaat bagi pelaku UMKM dalam melakukan proses pengambilan keputusan maupun untuk melakukan pengajuan kredit.

Purwaningsih (2018) mengatakan bahwa laporan keuangan juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk pemilik dalam melakukan perhitungan keuntungan yang didapatkan, untuk mengetahui seberapa tambahan modal yang mampu dicapai, dan laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana keseimbangan antara hak serta kewajiban yang dimiliki. Pengambilan keputusan dalam pengembangan usaha didasarkan pada keadaan keuangan pada laporan keuangan secara lengkap bukan perolehan laba saja.

Agar dapat mengakses bank dengan mudah, maka UMKM harus membuat laporan keuangan. Akan tetapi, sebagian besar UMKM di Kecamatan Dukuh Pakis

tidak menyusun laporan keuangan tetapi hanya membuat catatan sederhana yaitu berupa pencatatan kas masuk dan kas keluar saja. Mereka berpikir bahwa menyusun laporan keuangan adalah hal yang rumit dan perlu diberikan pelatihan atau bantuan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum. Sehingga dalam memberikan informasi, para pelaku UMKM belum mampu melakukannya. Padahal dengan adanya pencatatan keuangan, seperti pembukuan mengenai kegiatan operasional usaha, pelaku UMKM di Kecamatan Dukuh Pakis akan dapat melihat perkembangan usahanya apakah mengalami keuntungan atau kerugian sehingga mampu menentukan sehat atau tidaknya usaha yang dijalankan.

Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan di Indonesia dalam membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan adalah SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) yang disahkan pada tanggal 24 Oktober 2016 oleh DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) sebagai organisasi profesi akuntansi di Indonesia dan mulai efektif per 1 Januari 2018. SAK EMKM disusun dengan tujuan untuk mendorong dan juga memberikan fasilitas kebutuhan mengenai pelaporan keuangan UMKM. Telah banyak riset yang menyimpulkan bahwa sebagian UMKM masih belum bisa untuk menerapkan SAK ETAP secara tepat, karena UMKM menganggap SAK ETAP terlalu kompleks dan juga tidak sesuai digunakan untuk kebutuhan pelaporan keuangan UMKM (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Dengan adanya SAK EMKM diharapkan mampu memudahkan para pelaku UMKM dalam Menyusun laporan keuangannya dan dapat memudahkan UMKM

untuk mendapatkan dana dari berbagai Lembaga keuangan.

Alasan lain UMKM belum menerapkan SAK ETAP adalah karena keterbatasan waktu, kurangnya pemahaman tentang akuntansi, dan kurangnya sumber daya manusia, sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh UKM masih sangat sederhana. SAK EMKM lebih mudah dibanding dengan SAK ETAP karena, terdiri dari tiga komponen yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan CALK. Berbeda dengan SAK ETAP yang terdiri dari lima Komponen yaitu, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Untuk UKM, menyusun laporan keuangan dengan lima komponen bagi mereka mungkin terlalu sulit. Oleh karena itu, SAK EMKM diterbitkan untuk memudahkan UKM dalam menyusun laporan keuangan (Satiya et al., 2020).

Implementasi tentang SAK EMKM juga dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan pemilik UMKM itu sendiri. Tingkat pendidikan merupakan pendidikan terakhir baik formal maupun non formal yang dimiliki oleh seseorang. Semakin tinggi tingkat Pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola berpikir. Seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi atau memiliki pengetahuan akuntansi akan mengetahui manfaat dari penerapan SAK EMKM (Kusuma & Lutfiany, 2019).

Pemahaman dalam akuntansi juga dibutuhkan agar menjadi dasar dalam memahami dan mengimplementasikan laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Pemahaman akuntansi merupakan seseorang yang benar-benar memahami proses pencatatan transaksi keuangan, pengelompokan, pelaporan dan penafsiran data

keuangan. Semakin baik pemahaman akuntansi yang dimiliki pemilik ataupun manajer, semakin bagus kemampuan mereka dalam mengimplementasikan SAK EMKM ke dalam laporan keuangan (Kusuma & Lutfiany, 2019).

Kebijakan SAK EMKM yang baru telah disahkan, sehingga perlu ada sosialisasi, karena dengan cara sosialisasi maka akan menimbulkan pemahaman yang baik tentang SAK EMKM. Sosialisasi SAK EMKM merupakan pemberian informasi kepada pelaku UMKM mengenai standar yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan dari pihak yang memahami SAK EMKM. Sosialisasi SAK EMKM juga dapat diartikan sebagai proses seseorang belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan tertentu dan mengkoordinasikan perilakunya dengan perilaku orang lain serta belajar sesuai dengan peranan dan peraturan yang ditetapkan yaitu SAK EMKM (Janrosi, 2018). Sosialisasi yang diberikan oleh lembaga terkait maupun pihak lain yang memahami SAK EMKM kepada pelaku UMKM akan mempengaruhi pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Pelaku UMKM yang semakin sering mendapatkan sosialisasi, maka pelaku UMKM tersebut akan lebih memahami penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM untuk usaha yang dijalankannya (Andari et al., 2022).

Ukuran usaha yaitu skala yang menunjukkan besar atau kecilnya sebuah organisasi atau perusahaan yang dapat diukur menggunakan beberapa cara (Suastini et al., 2018). Cara untuk melihat sebuah ukuran perusahaan, yaitu dapat dilihat dari nilai aset perusahaan, jumlah karyawan, dan volume penjualan. Ukuran usaha yang semakin besar, maka akan mempengaruhi pemahaman dalam penyusunan laporan

keuangan berdasarkan SAK EMKM. Dapat dikatakan bahwa ukuran usaha yang semakin besar, maka kebutuhan modal pelaku usaha juga akan semakin besar. Kebutuhan modal yang belum terpenuhi pada usaha tersebut diperlukan pendanaan pihak ketiga. Oleh karena itu, kebutuhan modal usaha akan mempengaruhi pelaku UMKM untuk memahami mengenai laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku.

Selama ini UMKM di Kota Surabaya belum merencanakan penggunaan keuangan dengan baik. Kebanyakan UMKM belum memahami cara menyusun laporan keuangan yang akan berdampak positif untuk kemajuan usahanya yang disebabkan karena rendahnya latar belakang sumber daya pelaku UMKM, kurangnya pemahaman akan akuntansi, belum mendapatkan sosialisasi tentang SAK EMKM, serta menghiraukan ukuran usaha yang menyebabkan terhambatnya pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Sudah saatnya UMKM untuk mulai memikirkan cara perencanaan keuangan yang tepat agar dapat meningkatkan pendapatan guna membangkitkan perekonomian di Indonesia termasuk Surabaya.

Maka dari itu, peneliti memilih UMKM yang berada di Kecamatan Dukuh Pakis untuk melihat informasi mengenai pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, sosialisasi dan ukuran usaha terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM di Kecamatan Dukuh Pakis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya UMKM dan menjadikan masyarakat ikut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi,**

Sosialisasi Dan Ukuran Usaha Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM?
2. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM?
3. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM?
4. Apakah ukuran usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran usaha terhadap

penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik, diantaranya:

1. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang terkait dengan UMKM khususnya mengenai tingkat Pendidikan, pemahaman akuntansi, sosialisasi dan ukuran usaha.

2. Manfaat bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman khususnya untuk mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur mengenai tingkat Pendidikan, pemahaman akuntansi, sosialisasi dan ukuran usaha.

3. Manfaat bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam pengembangan UMKM, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.